

SKRIPSI

**RELASI HAK PREROGATIF PRESIDEN DAN PERTIMBANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN
PEMBUBARAN KEMENTERIAN NEGARA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

RAHMAT ZIDAN SETIAWAN

BP 2110113002

PROGRAM KEKHSUSAN HUKUM TATA NEGARA (PK-V)



Pembimbing :

Arfiani, S.H., M.H

Beni Kharisma Arrasuli, SHI, LLM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg : 7/PK-V/I/2026

**RELASI HAK PREROGATIF PRESIDEN DAN PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN
KEMENTERIAN NEGARA**

Rahmat Zidan Setiawan, BP 2110113002, Fak. Hukum Universitas Andalas, 73 Hlm, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji relasi hak prerogatif Presiden dan pertimbangan DPR dalam proses pembentukan, perubahan, serta pembubaran kementerian negara di Indonesia. Meskipun hak prerogatif merupakan otoritas eksekutif yang secara historis bersifat absolut, pengadopsian konsep *distribution of power* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern mengharuskan adanya mekanisme *checks and balances*. Karena itu penelitian ini mempertanyakan 1) Bagaimana mekanisme pengaturan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara? Dan 2) Bagaimana bentuk relasi antara presiden dan DPR dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara? Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menemukan: pertama, membentuk, mengubah, dan membubarkan hak prerogatif presiden yang dibatasi dan/ atau diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik dasar hukumnya dan pelaksanaannya. Kedua, bentuk relasi hak prerogatif presiden dan pertimbangan DPR dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang yang menghasilkan gambaran relasi yang berbeda. Pertama, dari sudut pandang politik, maka bentuk relasi yang akan terlihat adalah antagonis atau akomodatif. Kedua, dari sudut pandang konstitusi presiden dan DPR diposisikan dalam posisi yang sejajar sehingga keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk saling mengawasi pelaksanaan hak prerogatif presiden. Dan ketiga, dari sudut pandang UU Kementerian Negara yang memperlihatkan pengaruh DPR dalam mengatur pelaksanaan hak prerogatif presiden sekaligus memperlihatkan pembatasan keterlibatan DPR dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden.

*Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pertimbangan DPR, Pembentukan, Perubahan, dan
Pembubaran Kementerian Negara*

